

**PROGRAM LEGISLASI NASIONAL  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TAHUN 2015-2019**

<b>NO</b>	<b>JUDUL RUU</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	DPR/PEMERINTAH
2	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	DPR/PEMERINTAH
3	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	DPR/PEMERINTAH
4	RUU tentang Persandian	DPR/PEMERINTAH
5	RUU tentang Rahasia Negara	DPR/PEMERINTAH
6	RUU tentang Keamanan Nasional	DPR/PEMERINTAH
7	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR/PEMERINTAH
8	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR/PEMERINTAH
9	RUU tentang Konvergensi Telematika	DPR/PEMERINTAH/DPD
10	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara	PEMERINTAH

11	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	PEMERINTAH
12	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	DPR
13	RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi	PEMERINTAH
14	RUU tentang Wawasan Nusantara	DPD
15	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos	PEMERINTAH
16	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	DPR/DPD
17	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah	PEMERINTAH
18	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	DPR
19	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	DPR
20	RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum	DPR/PEMERINTAH
21	RUU tentang Pertanahan	DPR

22	RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD	DPR/PEMERINTAH/DPD
23	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	DPR/PEMERINTAH/DPD
24	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara	DPR/DPD
25	RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	DPR/PEMERINTAH
26	RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur	DPD
27	RUU tentang Provinsi Bali	DPD
28	RUU tentang Etika Penyelenggara Negara / RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan	DPR
29	RUU tentang Partisipasi Masyarakat	DPD
30	RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan	DPD
31	RUU Sistem Penyelesaian Konflik Agraria	DPR
32	RUU tentang Perkumpulan	DPR/PEMERINTAH/DPD

33	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH
34	RUU tentang Hukum Acara Pidana	DPR
35	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan	DPR/PEMERINTAH
36	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	PEMERINTAH/DPD
37	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR/PEMERINTAH
38	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	PEMERINTAH/DPD
39	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	DPR/PEMERINTAH
40	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	DPR
41	RUU tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH
42	RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat	DPR/DPD
43	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	DPR/PEMERINTAH

44	RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana	PEMERINTAH
45	RUU tentang Mahkamah Agung	DPR
46	RUU tentang Merek	PEMERINTAH
47	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	PEMERINTAH
48	RUU tentang Ekstradisi (mengganti UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi)	PEMERINTAH
49	RUU tentang Paten	PEMERINTAH
50	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	PEMERINTAH
51	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	DPR
52	RUU tentang Jabatan Hakim	DPR
53	RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer	PEMERINTAH
54	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	PEMERINTAH
55	RUU tentang Pemandahan Narapidana Antarnegara	PEMERINTAH

56	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	PEMERINTAH
57	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	PEMERINTAH
58	RUU tentang Balai Harta Peninggalan	PEMERINTAH
59	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI	DPR
60	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	DPR
61	RUU tentang Penghinaan Dalam Persidangan ( <i>Contempt of Court</i> )	DPR
62	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial	DPR
63	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR
64	RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik	DPR/PEMERINTAH/DPD
65	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya	DPR/PEMERINTAH
66	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR/DPD

67	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	DPR/PEMERINTAH
68	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	DPR/PEMERINTAH
69	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	DPR
70	RUU tentang Zona Tambahan Indonesia	PEMERINTAH
71	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	DPR/DPD
72	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	DPR/PEMERINTAH
73	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	DPR/DPD
74	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	DPR
75	RUU tentang Kedaulatan Pangan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan)	DPR
76	RUU tentang Jalan	DPR/DPD
77	RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat	DPR
78	RUU tentang Jasa Konstruksi	DPR

79	RUU tentang Arsitek	DPR
80	RUU tentang Sistem Transportasi Nasional	DPR
81	RUU tentang Pengembangan Pembangunan Daerah Kepulauan	DPR
82	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	DPR
83	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR
84	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	DPR/DPD
85	RUU tentang Perkoperasian	DPR/PEMERINTAH/DPD
86	RUU tentang Pertembakauan	DPR
87	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR
88	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR
89	RUU tentang Bahan Kimia	PEMERINTAH
90	RUU tentang Metrologi Legal	PEMERINTAH
91	RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah	DPD



92	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	PEMERINTAH
93	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	DPR
94	RUU tentang Ekonomi Kreatif	DPD
95	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR
96	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	DPR
97	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan	DPR/PEMERINTAH
98	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam	DPR
99	RUU tentang Geologi	DPR/DPD
100	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi	DPR
101	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	DPR
102	RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender	DPR/PEMERINTAH/DPD
103	RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	DPR

104	RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah	DPR
105	RUU tentang Tabungan Haji	DPR
106	RUU tentang Penyandang Disabilitas	DPR
107	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	DPR/DPD
108	RUU tentang Kepalangmerahan	DPR
109	RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial	DPR
110	RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan	DPR
111	RUU tentang Ketahanan Keluarga	DPR
112	RUU tentang Perlindungan Umat Beragama	DPR/PEMERINTAH
113	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	PEMERINTAH
114	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	DPR
115	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR

116	RUU tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	DPR/DPD
117	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DPR
118	RUU tentang Kebidanan	DPR/DPD
119	RUU tentang Kekarantina Kesehatan	PEMERINTAH
120	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	DPR
121	RUU tentang Praktik Kefarmasian	DPR
122	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia	DPR
123	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular	PEMERINTAH
124	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	PEMERINTAH
125	RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan	DPR/PEMERINTAH
126	RUU tentang Sistem Pengupahan	DPR/PEMERINTAH
127	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR/PEMERINTAH/DPD
128	RUU tentang Kebudayaan	DPR

129	RUU tentang Bahasa dan Kesenian Daerah	DPD
130	RUU tentang Sistem Perbukuan	DPR
131	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	DPR/DPD
132	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	DPR
133	RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan	DPR/PEMERINTAH/DPD
134	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia	DPR
135	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	DPR/PEMERINTAH
136	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	DPR/PEMERINTAH
137	RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah	DPR/PEMERINTAH
138	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan	PEMERINTAH
139	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	DPR/DPD
140	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	DPR

141	RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal	PEMERINTAH
142	RUU tentang Pajak Penghasilan	PEMERINTAH/DPD
143	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	PEMERINTAH/DPD
144	RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara	PEMERINTAH/DPD
145	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	DPR
146	RUU tentang Perubahan Harga Rupiah	PEMERINTAH
147	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun	PEMERINTAH
148	RUU tentang Lelang	PEMERINTAH
149	RUU tentang Penjaminan	DPR
150	RUU tentang Penjaminan Polis	PEMERINTAH
151	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan	PEMERINTAH
152	RUU tentang Penilai	PEMERINTAH
153	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa	DPD

154	RUU tentang Perekonomian Nasional	DPR/DPD
155	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	PEMERINTAH
156	RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia	PEMERINTAH
157	RUU tentang Bea Materai	PEMERINTAH
158	RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan	PEMERINTAH
159	RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	PEMERINTAH
160	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPR

<b>DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA</b>	
1	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2	Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang